

KEPERCAYAAN PUBLIK MENURUN, OMBUDSMAN JAMBI TEKANKAN PENTINGNYA INTEGRITAS APARAT

Jum'at, 14 November 2025 - jambi

Jambi - Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini tengah diuji. Perkembangan teknologi informasi membuat berbagai kabar negatif mengenai pelayanan publik dengan cepat menyebar luas. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para pimpinan lembaga dan seluruh pegawai yang memberikan layanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, saat memberikan pengarahan pada kegiatan Post Assessment yang diselenggarakan Biro SDM Polda Jambi pada Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Satlantas dan Kapolsek di wilayah kerja Polda Jambi.

Saiful menjelaskan bahwa sentimen publik terhadap pemerintah secara umum masih cenderung negatif. Karena itu, dibutuhkan kesadaran dan upaya ekstra dari para penyelenggara pelayanan untuk memulihkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat.

"Saat ini, meskipun kita merasa sudah bekerja baik, masyarakat masih memandang buruk. Apalagi jika apa yang kita lakukan memang tidak sesuai," ujarnya.

Ia berpesan agar seluruh bentuk pelayanan, baik administrasi maupun jasa, khususnya yang berada di lingkup kepolisian, terus ditingkatkan. Tidak boleh ada ruang bagi oknum untuk mengambil apa yang menjadi hak masyarakat.

"Di tengah kepercayaan yang rendah, seribu kebaikan bisa hilang hanya karena satu kesalahan oknum," ungkap Saiful.

Saiful menambahkan bahwa masyarakat kini semakin berani memviralkan hal-hal yang dianggap janggal ketika berurusan dengan aparat pemerintah. Karena itu, para penyelenggara layanan harus berhati-hati dan menjaga agar tidak memberikan citra negatif bagi lembaga.

"Kita mesti menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Berikan kinerja terbaik kepada masyarakat. Itu yang harus dijaga," tegasnya.

Ombudsman terus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan. Masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan maladministrasi dalam layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.